

**ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**Nira Julia Ningsih  
NPM: 1551010251**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**Nira Julia Ningsih  
NPM: 1551010251**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Evi Ekawati S.E. M.Si**

**Pembimbing II : M. Kurniawan, SE., M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki persepsi bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan hingga akhirnya melakukan strategi pengurangan tarif pajak atau agresivitas pajak. Tindakan ini menjadikan perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial serta tidak sesuai dengan kaidah *corporate social responsibility*(CSR) dan kaidah ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan dan pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan ukuran *effective tax rates*. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Penelitian ini menggunakan sembilan puluh sembilan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh enam belas perusahaan pertahun 2010-2018. Data dianalisis menggunakan model analisis regresi *ordinary least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan berarah negatif dengan agresivitas pajak. Masalah CSR dan agresivitas pajak berkesesuaian dengan firman Allah Swt. di dalam QS. Al-Qasas ayat 77.

Kata kunci: *corporate social responsibility*, agresivitas pajak, dan ekonomi Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)**

**Nama : Nira Julia Ningsih**

**NPM : 1551010251**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Evi Ekawati S.E. M.Si**  
**NIP. 197602022009122001**

**Pembimbing II,**

**M. Kurniawan, SE., M.E.Sy**  
**NIP. 198605172015031005**

**Ketua Jurusan,**

**Madnasir, S.E., M.S.I**  
**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skipripsi dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh, Nira Julia Ningsih, NPM: 1551010251, program studi Ekonomi Syariah, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Juni 2020

**Tim Penguji**

**Ketua** : Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I ( )

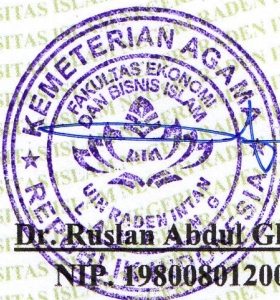
**Sekretaris** : Dimas Pratomo, S.E.I., M.S.I ( )

**Penguji I** : Hanif, S.E., M.M ( )

**Penguji II** : Evi Ekawati S.E.M.Si ( )

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 198008012003121001**



## MOTTO

لَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا آخِرَةَ الدَّارِ اللَّهُ أَتَنَلِكُ فِيمَا وَابْتَغِ  
الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَتَّبِعْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>1</sup>

(Al-Qasas: 77)

اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ عَلَّمْنَا بِعِلْمِكَ مَا تَرْضَاهُ عَنَّا وَيَا حَلِيمُ خَلَقْنَا بِخُلُقِ الْجَلْمِ وَيَا حَقِيقُ حَقَّقْنَا بِحَقِّكَ الْعِلْمِ وَيَا هَادٍ  
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Ya Allah ajarkanlah kami dengan ilmu-Mu, wahai Dzat yang Maha Bijaksana berilah kami akhlak yang bijaksana, wahai Dzat yang Maha Haq limpahkanlah haq pada kami dengan haq-haqqnya ilmu-Mu, wahai Dzat yang menunjukkan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Madinatul Ilmi, 2012), h. 394.

<sup>2</sup>Miftahul Huda 407, *Kumpulan Do'a-Do'a* (Lampung Barat: Pondok Pesantren Miftahul Huda, 2001), h. 1.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Alloh Swt. atas segala nikmat-Nya, sehingga saya mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *basmallah*, dengan rasa syukur, dan kerendahan hati, saya persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayah dan Ibu saya, Bapak Yendraman dan Ibu Yenni sebagai dunia pertama saya juga sebagai alasan pertama dari setiap langkah saya.
2. Kakak saya, Revia Viviyani yang begitu berenergi dalam mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kemudian juga untuk kedua adik saya, Resi Febriyani dan Ahmad Ragil yang menjadi bagian dari motivasi.
3. Almamater, teman-teman, serta sahabat-sahabat mahasiswa/i UIN Raden Intan Lampung sebagai bagian dari perjalanan saya dan sebagai bagian besar dari penyelesaian studi saya.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nira Julia Ningsih, dilahirkan di Puralaksana, Lampung Barat pada tanggal 15 Juli 1997. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Yendraman dan Ibu Yenni.

Pendidikan penulis dimulai dari SDN 03 Puralaksana, Lampung Barat dan selesai pada tahun 2009. Lalu penulis melanjutkan studi ke jenjang menengah pertama di MTS Al-Ikhlas Fajar Bulan, Lampung Barat dan selesai pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 01 Waytenong, Lampung Barat dan selesai pada tahun 2015.

Penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2015.





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin, alhamdulillahiladzi 'an'amaa 'alaina bini'matil imaani wal Islam.* Segala puji bagi Allah Swt. tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pemahaman, nikmat hafalan, nikmat ilmu, nikmat kebijaksanaan akhlak, nikmat taqwa, dan nikmat kesehatan. Rasa syukur yang amat besar penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena atas semua nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam” sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



*Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.* Segala rahmat dan keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari andil beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang sudah memimpin pembentukan karakter dan memimpin persiapan pengabdian penulis pada masyarakat.

2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mengarahkan pembentukan karakter dan mengarahkan pembekalan untuk pengabdian penulis pada masyarakat.
3. Ibu Evi Ekawati, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang sudah menjadi salah satu dosen pengajar penulis selama berada di program studi Ekonomi Syariah dan sudah meluangkan waktu juga pikiran, memberikan arahan juga motivasi, demi terbentuknya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat berjasa baik dalam ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang penulis.
5. Staf dan karyawan akademik yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis. Begitu pula untuk perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang juga sudah mempertemukan penulis dengan banyak jendela dunia.
6. Teman-teman kelas F di Jurusan Ekonomi Syariah, para sahabat, Nursida Amanah dan Sulistiyani Lewasari, juga semua pihak yang sudah membantu baik dalam studi maupun dalam penyelesaian skripsi.
7. Keluarga. Tidak ada kata juga bentuk terimakasih yang terasa pantas diberikan kepada Ayah, Ibu, kakak, dan kedua adik penulis. Penulis hanya mampu berucap maaf pada keluarga.



*Jazakumulloh khairon katsiron*, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/I sekalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi dukungan ilmu ataupun referensi bagi setiap pihak yang membutuhkannya. Penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf untuk itu, penulis juga merima kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca.

Lampung Barat, 10 April 2020

Penulis,



**Nira Julia Ningsih**  
NPM. 1551010251

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Teori Legitimasi dan Teori <i>Stakeholder</i> .....	18



a. Teori Legitimasi .....	18
b. Teori <i>Stakeholder</i> .....	19
2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	
a. Pengertian dan Pelaksanaan CSR .....	22
b. <i>CSR Disclosure</i> dan <i>CSR Disclosure Indexs</i> .....	27
3. Agresivitas Pajak	
a. Pengertian Agresivitas Pajak .....	29
b. Peraturan Perpajakan di Indonesia .....	31
4. Variabel Kontrol	
a. Profitabilitas .....	32
b. <i>Leverage</i> .....	33
c. <i>Capital Intensity</i> .....	33
5. CSR dan Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam	
a. CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	34
b. Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	41
B. Tinjauan Pustaka .....	45
C. Kerangka Pemikiran.....	52
D. Hipotesis.....	53

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian .....	56
C. Definisi Operasional Penelitian	
1. Variabel Independen.....	59

2. Variabel Dependen .....	60
3. Variabel Kontrol	
a. Profitabilitas .....	61
b. <i>Leverage</i> .....	61
c. <i>Capital Intensity</i> .....	61
D. Metode Pengumpulan Data .....	62
E. Metode Analisis Data	
1. Uji Statistik Deskriptif.....	63
2. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas.....	66
b. Uji Multikolonieritas.....	66
c. Uji heterokedastisitas.....	65
3. Pengujian Hipotesis	
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	66
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	66
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	67



#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Menggunakan Variabel Kontrol	
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	69
2. Analisis Deskriptif .....	72
3. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas.....	73
b. Uji Multikolonieritas.....	73



c. Uji heterokedastisitas .....	76
4. Uji Hipotesis	
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	77
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	78
B. Hasil Penelitian Tanpa Menggunakan Variabel Kontrol	
1. Anilis Deskriptif.....	80
2. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas.....	81
b. Uji Heteroskedastisitas.....	81
3. Anilis Regresi Linear Sederhana.....	82
C. Pembahasan	
1. Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak.....	84
2. Pandangan Islam Mengenai Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka .....	49
Tabel 3.1 Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian .....	58
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1 Jumlah dan Klasifikasi Sampel Penelitian .....	73
Tabel 4.2 Descriptive Statistics.....	73
Tabel 4.3 Test of Normality .....	75
Tabel 4.4 Coefficients .....	76
Tabel 4.5 Model Summary.....	77
Tabel 4.6 ANOVA .....	78
Tabel 4.7 Coefficients.....	80
Tabel 4.8 Descriptive Statistics.....	80
Tabel 4.9 One Sample Kolmogorov Smirnov Test.....	81
Tabel 4.10 Coefficients.....	82
Tabel 4.11 Variables Entered/ Removed <sup>b</sup> .....	82
Tabel 4.12 Model Summary <sup>b</sup> .....	82
Tabel 4.13 Coefficients <sup>a</sup> .....	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Uji Normalitas P-P Plot.....	74
Gambar 4.2 Uji Scatter Plot .....	75





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabel Perusahaan Terdaftar di Indeks LQ45 2010-2018

Lampiran 2 Data ETR, CSR, ROA, Leverage, dan Capital Intensity

Lampiran 3 Item-item pengungkapan CSR

Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 Surat Persetujuan Perubahan Judul



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Penegasan dilakukan sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam penegasan ini akan diuraikan arti dan makna beberapa istilah sesuai judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi terhadap tujuan penelitian dan untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

Judul penelitian ini yaitu **Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam**(Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 Periode 2010-2018). Istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** yang dimaksud di sini yaitu analisis data yang memiliki pengertian sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: CV ALFABETA, 2016), h. 402.

2. **Pengaruh** merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan sebagainya.<sup>4</sup>
3. **Corporate Social Responsibility (CSR)** merupakan usaha penyeimbangan komitmen yang dilakukan oleh suatu bisnis terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan bisnisnya yang meliputi konsumen, pembisnis lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal.<sup>5</sup>
4. **Agresivitas Pajak** merupakan tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.<sup>6</sup>
5. **Ekonomi Islam** merupakan kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>7</sup>



## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Objektif

Pada tahun 2015 lalu Indonesia belum mampu mewujudkan sepenuhnya ratifikasi kesepakatan *Global Millenium Development Goals* (MDGs) yang

---

<sup>4</sup>Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux* (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 369.

<sup>5</sup>Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, *Bisnis Edisi ke Delapan Jilid 1*, terjemahan Sita Wardhani (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 68.

<sup>6</sup>Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Rego, "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relations to Aggressive Financial Reporting", *The Accounting Review*, Vol. 84 No. 2 (Maret 2009), h. 467-496.

<sup>7</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 10.



dicanangkan oleh PBB yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran global.<sup>8</sup>

Sejatinya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat. Kontribusi yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yaitu ketaatan dalam membayar pajak. Namun, Yenni Mangoting dalam penelitiannya menyebutkan bahwa wajib pajak (dalam hal ini perusahaan) menganggap pajak sebagai beban yang perlu diminimalisasi dengan melakukan *tax planning*.<sup>9</sup>

*Tax planning* yang belakangan populer dengan sebutan agresivitas pajak juga pernah diteliti oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012. Disebutkan bahwa agresivitas pajak semakin umum terjadi pada perusahaan di seluruh dunia. Padahal agresivitas pajak sebenarnya tidak hanya menghasilkan manfaat tetapi juga dapat menghasilkan biaya yang signifikan.<sup>10</sup>

Bagi negara Indonesia, tindakan agresif pajak tentu dapat sangat merugikan mengingat kedudukan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Salah satu solusi untuk permasalahan ini yaitu pengungkapan penerapan CSR oleh perusahaan. Watson pada tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR lebih agresif melakukan strategi

---

<sup>8</sup>Lisbet, "Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional". *Politica*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2013), h. 129-156.

<sup>9</sup>Yenni Mangoting, "*Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1 (Mei 1999), h. 43-53, Dikutip oleh Maretta Yoehana, "*Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*". (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 3.

<sup>10</sup>Grant Richardson, Roman Lanis, "*Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*", *J. Account. Public Policy*, Vol.32 (2012), h. 68-88.

terhadap pajak dibanding perusahaan yang sadar sosial.<sup>11</sup> Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012. Di Indonesia penelitian serupa juga pernah dilakukan di antaranya oleh Pradnyari bersama Rohman pada tahun 2015, dan memiliki kesimpulan yang serupa pula.

Penelitian Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam ini dilakukan sebab di Indonesia penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh Pradnyari dan Rohman atau peneliti-peneliti terdahulu lainnya hanya mengungkapkan hasil dari sampel yang terbilang kecil dalam rentan waktu yang terlalu singkat. Kemudian, penelitian ini juga dilakukan karena belum ditemukannya penelitian serupa yang menilik dari sudut pandang ekonomi syariah. Penelitian ini juga perlu dikaji dari sudut pandang ekonomi syariah Islam sebab tindakan agresivitas pajak dan CSR juga merupakan tindakan yang dijelaskan di dalam ekonomi Islam.

Pemilihan sampel penelitian berupa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 dilakukan sebab perusahaan yang terdaftar di indeks pasar saham ini merupakan perusahaan yang dianggap paling likuid, serta memiliki kondisi keuangan dengan prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

Pemilihan tahun penelitian yang dimulai dari laporan keuangan tahun 2010 sampai tahun 2018 yaitu karena tarif perpajakan terbaru, berlaku sejak tahun 2010. Penelitian ini berakhir pada laporan keuangan di tahun 2018 sebab

---

<sup>11</sup>L. Watson, “*Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Earnings Performance*”. *Journal of the American Taxation Association*, 37(2) (2014), h. 1–34.

penelitian dilakukan sejak tahun 2019, sehingga data yang sudah tersedia secara lengkap yaitu data laporan keuangan sampai tahun 2018.

## 2. Alasan Subjektif

Secara subjektif penelitian ini dilakukan karena ketersediaan literatur atau referensi yang menunjang upaya penyelesaian skripsi ini. Penelitian ini juga dilakukan karena adanya kesesuaian objek kajian dengan prodi ekonomi syariah.

## C. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan *Millenium Development Goals* (MDGs). Melalui MDGs ini tujuan negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran global ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015. MDGs meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan untuk semua orang, promosi kesetaraan gender, penurunan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan kemitraan global dalam pembangunan.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan global tersebut, yang artinya pemerintah harus serius melakukan berbagai upaya agar delapan sasaran yang dicanangkan PBB bisa dicapai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Komitmen Indonesia secara nyata terealisasi dengan keberhasilan Indonesia mencapai beberapa target dalam tujuan MDGs

---

<sup>12</sup>[Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diunduh pada tanggal 20 Juli 2013, dikutip oleh Yayan Sopyan, "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat". *Ahkam*, Vol. XIV No. 1 (Januari 2014), h. 53-62.



yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta menurunkan angka kematian anak. Beberapa tujuan MDGs yang belum dicapai Indonesia adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,<sup>13</sup> meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, kemudian pada tahun 2015 lalu Indonesia juga belum berhasil membangun kemitraan global untuk pembangunan.<sup>14</sup>

Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sejatinya adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah harus bisa menarik masyarakat dan pihak perusahaan atau swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Kolaborasi antara pemerintah bersama masyarakat dan juga pihak perusahaan atau swasta ini dilakukan untuk mewujudkan kegiatan pembangunan dengan mengutamakan program prioritas yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perluasan lapangan kerja sebagai pilar pembangunan. Salah satu cara masyarakat dan pihak perusahaan atau swasta terlibat aktif dalam pembangunan yaitu dengan tertib membayar pajak.

---

<sup>13</sup>Bahan Tertulis dari Kementerian Keuangan Indonesia yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Mencapai Target MDGs 1,4 dan 5” pada hari Selasa, 30 Maret 2010 dengan judul “*Dukungan Anggaran Pemerintah Dalam Percepatan Pencapaian MDGs*”, dikutip oleh Lisbet, “Pencapaian Millenium Development Goals (Mdgs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional”. *Politica*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2013), h. 141 menyebutkan bahwa “Sebelum tahun 1996 Indonesia dapat dikatakan telah berhasil memenuhi target tujuan ke-1 yakni menurunkan tingkat kemiskinan sampai ke 10,30 persen pada tahun 2015. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan tujuan ini ke dalam kategori tujuan yang sudah dicapai.”

<sup>14</sup>Lisbet, “Pencapaian Millenium Development....”, h. 129-156.

Pemerintah dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi negara membutuhkan dana yang besar. Dana pembangunan oleh pemerintah bersumber dari penerimaan negara meliputi pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Informasi APBN 2019 menyebutkan pendapatan negara pada tahun 2019 ini sebesar Rp 2.165,1 Triliun yang berasal dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp 378,3 Triliun, hibah Rp 0,4 Triliun, dan penerimaan perpajakan Rp 1.786,4 Triliun. Pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara dengan persentase 82,5%, sedangkan PNB dan hibah memberikan kontribusi sebesar 17,5%.<sup>15</sup>

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatatkan dalam periode tahun 2010-2018 pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan Negara melalui pembayaran pajak (baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional) sebesar Rp 723.307,00 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 1.786.378,70 milyar pada tahun 2019. Dalam periode tersebut, total penerimaan perpajakan cenderung mengalami peningkatan, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia**  
**(milyaran rupiah)**

Sumber Penerimaan Perpajakan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pajak Dalam</b>	<b>694.392,</b>	<b>819.752,</b>	<b>930.861,</b>	<b>1.029.85</b>	<b>1.103.21</b>	<b>1.205.47</b>	<b>1.249.49</b>	<b>1.304.31</b>	<b>1.506.43</b>	<b>1.743.05</b>

<sup>15</sup>Direktorat Jendral Anggaran, *Informasi APBN 2019 Republik Indonesia*, h. 15.

Negeri	00	00	80	0,0 0	7,60	8,8 9	9,50	6,3 0	6,20	6,90
Pajak Penghasilan	357.045,00	431.122,00	465.069,60	506.442,80	546.180,90	602.308,13	657.162,70	637.859,30	761.200,30	894.448,70
Pajak Pertambahan Nilai	230.605,00	277.800,00	337.584,60	384.713,50	409.181,60	423.710,82	412.213,50	480.724,60	564.682,40	655.394,90
Pajak Bumi dan Bangunan	28.581,00	29.893,00	28.968,90	25.304,60	23.476,20	29.250,05	19.443,20	16.770,30	17.433,90	19.103,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.026	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cukai	66.166,00	77.010,00	95.027,90	108.452,00	118.085,50	144.641,30	143.525,00	153.288,10	155.504,80	165.501,00
Pajak Lainnya	3.969,00	3.928,00	4.210,90	4.937,10	6.293,40	5.568,30	17.154,50	15.672,60	7.614,90	8.608,70
<b>Pajak Perdagangan Internas</b>	<b>28.915,00</b>	<b>54.122,00</b>	<b>49.656,30</b>	<b>47.456,60</b>	<b>43.648,10</b>	<b>34.939,97</b>	<b>35.470,70</b>	<b>39.213,60</b>	<b>42.048,80</b>	<b>43.321,80</b>



ional										
Bea Masuk	20.0 17,0 0	25. 26 6,0 0	28.4 18,4 0	31. 62 1,3 0	32.3 19,1 0	31. 21 2,8 2	32.4 72,1 0	35. 06 6,2 0	37.6 00,4 0	38.8 99,3 0
Pajak Ekspor	8.89 8,00	28. 85 6,0 0	21.2 37,9 0	15. 83 5,4 0	11.3 29,0 0	3.7 27, 15	2.99 8,60	4.1 47, 40	4.44 8,40	4.42 2,50
<b>Total Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723. 307, 00</b>	<b>87 3.8 74, 00</b>	<b>980. 518, 10</b>	<b>1.0 77. 30 6,7 0</b>	<b>1.14 6.86 5,80</b>	<b>1.2 40. 41 8,8 6</b>	<b>1.28 4.97 0,10</b>	<b>1.3 43. 52 9,8 0</b>	<b>1.54 8.48 5,00</b>	<b>1.78 6.37 8,70</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019**

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Richardson dan Lanis dalam penelitiannya pada tahun 2007 menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Namun, tujuan utama setiap perusahaan bisnis adalah peningkatan nilai demi meningkatkan profit. Sehingga tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih

besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.<sup>16</sup>

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning*. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba yang optimal.<sup>17</sup>

Lanis dan Richardson menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Manajerial perusahaan akan merancang strategi semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak. Hal ini menjadi strategi yang semakin umum terjadi pada perusahaan di seluruh dunia. Namun, agresivitas pajak perusahaan sebenarnya dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.<sup>18</sup> Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak negatif apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

---

<sup>16</sup>Grant Richardson dan Roman Lanis, “*Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform: Evidence From Australia*”, *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 26 (2007), h. 689-704.

<sup>17</sup>Yenni Mangoting, “*Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1 (Mei 1999), h. 43-53, Dikutip oleh Mareta Yoehana, “*Analisis Pengaruh Corporate....*”, h. 3.

<sup>18</sup>Grant Richardson, Roman Lanis, “*Corporate social responsibility....*”, h. 68-88.

Banyak peneliti telah mengungkapkan pengertian maupun pemahaman mengenai agresivitas pajak. Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Frank, Lynch, dan Rego menjelaskan tindakan agresif pajak adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*,<sup>19</sup> yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Sedangkan Timothy menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara, salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *legal tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan, kemudian cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.<sup>20</sup>

Watson menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan

---

<sup>19</sup>Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Rego, "*Tax Reporting Aggressiveness*....", h. 467-496.

<sup>20</sup>Yeung Chi Kwan Timothy, "*Effects of corporate governance on tax aggressiveness*", (Accounting Major An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours), Hong Kong Baptist University, Hong Kong, 2010), h. 1.

perusahaan yang sadar sosial.<sup>21</sup> Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pemberlakuan CSR oleh perusahaan berdasarkan pada *triple bottom line* yang memiliki konsep bahwa di dalam pelaksanaan bisnisnya, perusahaan harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. CSR atau sering juga disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan isu yang terus berkembang. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>22</sup>

Kaitan antara CSR dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Lanis dan Richardson juga Watson. Lanis dan Richardson pada penelitiannya mengenai analisis empiris pada CSR dan agresivitas pajak menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Lanis dan Richardson menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR)

---

<sup>21</sup>L. Watson, "Corporate Social Responsibility....", h. 1–34.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (3).



sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dengan pengukuran agresivitas pajak yang diuji oleh Watson menggunakan proksi UTB (*Unrecognized Tax Benefit*) menghasilkan kesimpulan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.

Tindakan agresivitas pajak di dalam Islam diyakini sebagai perbuatan yang tidak baik. Selama pajak yang diwajibkan oleh negara diambil secara adil dan memenuhi syaratnya maka sudah merupakan kewajiban warga negara untuk memenuhinya.<sup>23</sup>



“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Alloh. Mereka itulah orang-orang yang benar.”<sup>24</sup> (QS. Al-Hujurat: 15)

Ayat ini menyatakan bahwa mukmin yang beriman kepada Alloh tidak akan segan dalam berkontribusi harta dan jiwa di jalan Alloh. Dalam hal ini kontribusi pajak untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa juga merupakan jalan yang Alloh tunjukkan.

<sup>23</sup>Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, “Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim”, *Jurnal Al Qardh*, Vol. 5 No. 1 (Juli 2017), h. 12-25.

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Madinatul Ilmi, 2012), h. 517.

Pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Hal ini seperti firman Alloh yang tertuang dalam penggalan Al-Qur'an berikut,

﴿...مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ يَنْدُولُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ...﴾

“...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...”<sup>25</sup> (QS. Al-Hasyr: 7)

Tanggung jawab etis praktik CSR dalam pelaporan untuk pengungkapan aktivitas-aktivitas CSR kepada masyarakat penting sekali dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad Saw yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah, karena Allah Swt menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>26</sup>

Di Indonesia penelitian mengenai hubungan antara CSR dan agresivitas pajak sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013. Sedangkan objek penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan Perusahaan yang terdaftar di indeks


<sup>25</sup>Ibid., h. 546.

<sup>26</sup>Naning Fatmawatie, “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Akuntansi Sosial Ekonomi di Tinjau dari Syariah”, *Equilibrium*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 221-237.

LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengurangi dua variabel kontrol dari penelitian terdahulu yaitu ukuran perusahaan dan *inventory intensity* karena kurang sesuai untuk diterapkan pada objek penelitian ini. Variabel kontrol yang dipakai dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Analisis pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan uji regresi model *ordinary least square*.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan, tetapi juga akan menilik perspektif ekonomi Islam baik terhadap CSR maupun perilaku agresivitas pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**



Pajak sebagai salah satu sumber negara yang menjadi modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan memiliki permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang seharusnya berkontribusi baik terhadap pembayaran pajak berpersepsi bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga timbul tindakan meminimalisir pajak melalui cara yang legal, ilegal, atau pun keduanya dan biasa disebut dengan agresivitas pajak. Tindakan ini dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial serta tidak sesuai dengan kaidah CSR dan kaidah ekonomi Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab:

1. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian dapat menjadi salah satu literatur pengetahuan dan pemikiran ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi Islam secara khusus.
- 2) Penelitian dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dan pandangan Islam terhadap hal tersebut.

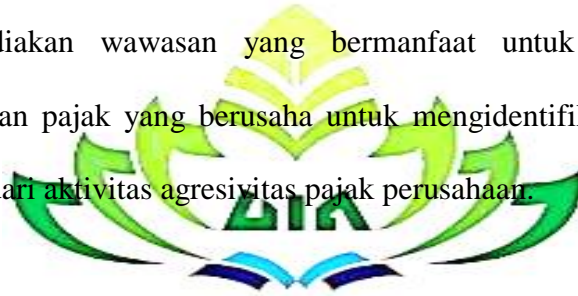
#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan khususnya



mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada kinerja perusahaan tetapi juga pada kepercayaan masyarakat.

- 2) Bagi investor sebelum menentukan keputusan untuk berinvestasi, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.
- 3) Bagi pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan yang bermanfaat untuk para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko lebih tinggi dari aktivitas agresivitas pajak perusahaan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Legitimasi dan Teori *Stakeholder*

###### a. Teori Legitimasi

Legitimasi adalah strategi yang dilakukan manajemen untuk mengembangkan perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan sosial lingkungan meliputi kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat.<sup>27</sup>

Hidayati dan Murni pada tahun 2009 menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Agar memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan berusaha meningkatkan return saham bagi investor. Agar memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan akan berusaha meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Agar memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Agar mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar

---

<sup>27</sup>Grant Richardson, Roman Lanis, “Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory”. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 No. 1 (2013), h. 75-100.

memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial.<sup>28</sup>

Teori legitimasi lebih lanjut di jelaskan oleh Deegan pada tahun 2002. Deegan mengungkapkan keterkaitan penerapan CSR oleh perusahaan dengan perilaku agresif pajak. Deegan menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang agresif pajak akan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang ketika mencoba untuk meringankan kekhawatiran publik, seperti menunjukkan bahwa telah memenuhi kewajibannya pada masyarakat untuk mengubah harapan masyarakat tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>29</sup>

#### **b. Teori Stakeholder**

Saat ini, pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas bisnis yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*) yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya berorientasi kepada pengelola (*agent*) dan pemilik (*principle*) mengalami perubahan kepada pandangan manajemen modern yang didasarkan pada teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* mengandung perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan

---

<sup>28</sup>Naila Nuur Hidayati, Sri Murni, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Earnings Response Coefficient* pada Perusahaan *High Profile*", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 (April 2009), h. 1–18.

<sup>29</sup>C. Deegan, "Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures-a theoretical foundation". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 Iss: 3 (2002), h. 282-311 dikutip oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), h. 14.

perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola (*setting*) lingkungan sosial dimana perusahaan berada.<sup>30</sup>

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, manajemen harus mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan.<sup>31</sup>

*Stakeholders* atau pemangku kepentingan adalah semua pihak yang menjadi sasaran utama pengembangan perusahaan (*all of the agents for whom the firm's development and good health are of prime concern*). Freeman pada tahun 1984 mengartikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh upaya organisasi dalam merealisasi tujuannya (*any group or individual that can affect or be affected by the realization of a firm's objectives*).<sup>32</sup>

Beberapa penulis mencoba membuat penggolongan lebih jauh, misalnya menjadi pemangku kepentingan utama (*prime stakeholders* atau disebut juga *contractual stakeholder*) yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi (misalnya kreditur atau konsumen) dan

---

<sup>30</sup>Azhar Maksum, Azizul Kholis, "Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility and Social Accounting): Studi Empiris di Kota Medan", *Simposium Nasional Akuntansi VI* (2003), h. 936-954 dikutip oleh Naila Nuur Hidayati, Sri Murni, "Pengaruh Pengungkapan Corporate....", h. 1-18.

<sup>31</sup>Manuel Castelo Branco, Lúcia Lima Rodrigues, "Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility", *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, Vol. 12 No. 1 (2007), h. 5-15.

<sup>32</sup>R. E. Freeman, *Strategic Management: Stakeholder Approach*, (Bostom: Pitman, 1984) dikutip oleh Gudono, *Teori Organisasi Ed. 4* (Yogyakarta: BPFE, 2017), h. 258.

pemangku kepentingan kedua (*secondary stakeholders* atau kadang juga disebut *diffuse stakeholder*) yaitu semua pihak yang mungkin dipengaruhi oleh tindakan organisasi walaupun dia tidak memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi. Penggolongan *stakeholder* dapat pula dilakukan dengan mengelompokkannya menjadi *internal stakeholder* (manajemen, karyawan, dan sebagainya) dan *external stakeholder* (pemilik, pemerintah, kreditur, dan sebagainya).<sup>33</sup>

Hal yang perlu diklarifikasi dalam hubungan antara teori *stakeholder* dan CSR bahwa CSR bukan kegiatan *corporate philanthropy*. *Corporate philanthropy* pada hakikatnya adalah kegiatan perusahaan yang menyumbangkan kembali laba yang telah diperolehnya kepada masyarakat sebagai ungkapan terimakasih atas input yang diperoleh dari masyarakat. *Corporate philanthropy* adalah penerapan prinsip sumbangan (*charity principles*) dari pihak yang kaya kepada pihak yang kurang beruntung. Walau ada perbedaan tersebut, beberapa penulis mengatakan bahwa CSR meliputi tapi tidak terbatas pada *corporate philanthropy*. CSR juga tidak sama dengan *sustainable development*. Konsep *sustainable development* lebih berkaitan dengan ide untuk penyelamatan planet bumi yang memiliki sumber daya terbatas. Bank dunia mengartikan *sustainable development* sebagai pola pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak mengorbankan kesempatan bertahan hidup secara nyaman di masa depan. Jika konsep *sustainable development* diterapkan ditingkat organisasi maka kegiatan-

---

<sup>33</sup>*Ibid.*



kegiatan akan terlihat pada kebijakan untuk menghemat energi, menghindari pembungkus plastik, memperbanyak komponen bahan yang bisa didaur ulang, dan mengurangi polusi. Sama halnya dengan *corporate philanthropy*, CSR juga meliputi, tapi tidak terbatas pada *sustainable development*.

Kaitannya dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholder*), melakukan CSR bisa dianggap sebagai usaha perusahaan atau organisasi untuk menjadi warga yang baik (*corporate citizenship*) di dalam lingkungannya dengan melakukan transaksi yang bersifat simbiosis mutualisme dengan semua pihak di dalam lingkungannya. Ditinjau dari pendekatan instrumental, Teori pemangku kepentingan (yang menyatakan bahwa mengelola kepentingan para pemangku kepentingan merupakan praktik bisnis yang baik karena bisa membuat perusahaan yang menjalankan *stakeholder management* akan mengalahkan pesaing yang tidak mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan), maka CSR dapat dibaca sebagai upaya untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih baik.<sup>34</sup>

## **2. Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **a. Pengertian dan Pelaksanaan CSR**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. CSR sangat erat hubungannya dengan hal ini dan sering dipahami hanya sebagai isu lingkungan. Padahal peran CSR di dalam pembangunan berkelanjutan tidak sederhana itu.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 267.

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan terhadap kelestarian alam. John Elkington menggambarkan pembangunan berkelanjutan di dalam bagan *triple bottom line* yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.<sup>35</sup> Di dalam perkembangan pengimplikasiannya, CSR juga dilakukan dengan bersandar pada konsep *triple bottom line* tersebut. CSR dilakukan sebagai bagian dari *sustainable development* tersebut.

CSR merupakan isu yang terus berkembang, sehingga terdapat keragaman pemahaman dari para ahli. Griffin dan Ebert mengartikan CSR atau kepedulian sosial sebagai usaha penyeimbangan komitmen yang dilakukan oleh suatu bisnis terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan bisnisnya yang meliputi konsumen, pembisnis lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal.<sup>36</sup>

Hackston dan Milne pada tahun 1996 mengartikan CSR sebagai suatu proses pengkoordinasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Pengertian lain juga disebutkan oleh Darwin pada tahun 2004, menurutnya CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela

---

<sup>35</sup>*The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business* (1998), karya John Elkington, dikutip oleh Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, "Panduan Lengkap Perencanaan CSR Cet. 1" (E-Book), (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), h. 12.

<sup>36</sup>Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, *Bisnis*...., h. 68.

<sup>37</sup>David Hackston, Milne Markus J., "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, Vol.9 No.1 (1996), h. 77-108 dikutip oleh Muhammad Rijalus Sholihin, Harnovinsah, Yoosita Aulia, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*" *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2 No. 2 (September 2018), h. 110-130.

mengintergrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.<sup>38</sup>

Pada tahun 2010 ISO 26000 ditetapkan menjadi pedoman standard CSR internasional. ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* memberikan definisi CSR sebagai berikut:

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.”

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices*, dan *consumer issues*.<sup>39</sup>

Di Indonesia, ketentuan pelaksanaan CSR terlampir pada Bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

---

<sup>38</sup>Ali Darwin, “Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia”, (Konvensi Nasional Akutansi V, Program Profesi lanjutan, Yogyakarta 2004) dikutip oleh Muhammad Rijal Sholihin, Harnovinsah, Yoosita Aulia, “Analisis Faktor-faktor....”, h. 110-130.

<sup>39</sup>Sukada, Sonny, Jalal, “Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen”. (Makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari 2008) dikutip oleh Edi Suharto, “Menggagas Standar Audit Program CSR” (Disampaikan pada 6<sup>th</sup> Round Table Discussion Menggagas Standar Audit Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas, Asosiasi Auditor Internal (AAI), Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008).

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Perusahaan yang wajib melakukan CSR yaitu perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>40</sup>

Peraturan-peraturan mengenai CSR juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.<sup>41</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, negara, dan para pemangku kepentingan lainnya, diantaranya:<sup>42</sup>

- 1) Bagi perusahaan, yang melakukan CSR akan memperoleh empat manfaat, yaitu: keberadaan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas,

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74.

<sup>41</sup>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan Pasal 34.

<sup>42</sup>Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 99 dikutip oleh Khusnul Fauziah, Prabowo Yudho J., "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2013), h. 12-20.

perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas dan perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) serta mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

- 2) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.



- 3) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi.
- 4) Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah *corporate misconduct* atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Secara sederhana CSR dapat disimpulkan sebagai tindakan tanggung jawab sosial dari keputusan dan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh



organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan bisnisnya. Di dalam penerapannya, CSR perusahaan berkaitan erat dengan teori legitimasi dan *stakeholder* perusahaan.

#### **b. CSR Disclosure dan CSR Disclosure Indexs**

Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh perusahaan dapat dilengkapi dengan pengungkapan CSR yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda meskipun memiliki jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh terhadap CSR yang dilakukan perusahaan. Perbedaan tersebut dikarenakan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. Hal ini juga menimbulkan perbedaan CSRD (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) di setiap perusahaan.<sup>43</sup>

CSRD atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai

---

<sup>43</sup>Rizkia Anggita Sari, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Nominal*, Vol. I No. I (2012), h. 124-140.

tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham.<sup>44</sup>

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diatur dalam regulasi klasifikasi Bapepam oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan. Pengungkapan CSR yang perlu dilakukan yaitu meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi tersebut pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).<sup>45</sup>

*Indexs* pengukuran CSR *disclosure* yang umumnya digunakan perusahaan sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR adalah konsep GRI (*Global Reporting Initiative*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, Mangoting dan Widuri pada Mei 2019, CSR pada penelitian ini diukur menggunakan parameter yang dikeluarkan oleh *GlobalReporting Initiative*

---

<sup>44</sup>Eddy Rismanda Sembiring, "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Maksi*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2006), h. 69-85.

<sup>45</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan.

(GRI), dengan cara setiap parameter pada laporan tahunan perusahaan yang tidak diungkapkan diberi nilai 0, dan yang diungkapkan diberi nilai 1.

Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tanggung jawab kepada stakeholder internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan pedoman pengungkapan GRI Versi 3.0.

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi internasional independen yang telah memelopori pelaporan keberlanjutan sejak 1997. GRI menerbitkan panduan laporan keberlanjutan pertama pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2002 dengan penamaan dan pengkodean yang spesifik dan disebut sebagai GRI G2 atau versi 2, dan direvisi kembali menjadi GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 yang diluncurkan pada tahun 2006, 2011, 2013, dan GRI *Global Standards* pada tahun 2016.<sup>47</sup>

Penggunaan GRI G3 atau GRI versi 3.0 sebagai pedoman pengukuran pengungkapan CSR setiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu karena penelitian dilakukan dalam rentang waktu sejak 2010 dan versi ini lebih

---

<sup>46</sup>GRI. 2013. *An Introduction to G4 The Next Generation of Sustainability Reporting*. Amsterdam, The Netherlands dikutip oleh Luh Tami Astini, Gede Adi Yuniarta, Putu Sukma Kurniawan, "Analisis Penerapan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2013-2016 (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)", *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 8 No. 2 (2017).

<sup>47</sup>GRI, "About GRI" (On-Line), dapat diakses di <https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx> (1 Mei 2020).

banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampel dalam rentang waktu tersebut.

### 3. Agresivitas Pajak

#### a. Pengertian Agresivitas Pajak

Pajak sebagai penerimaan terbesar negara mendorong pemerintah menggiatkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Dalam prakteknya, tetap banyak perusahaan dan orang pribadi sebagai wajib pajak yang masih enggan melakukan kewajiban membayar pajaknya. Wajib pajak juga seringkali melakukan minimalisasi pajak dengan berbagai strategi. Salah satu minimalisasi pajak yang kerap digunakan yaitu agresivitas pajak.

Midiastuty dan Suranta pada tahun 2016 mengungkapkan penelitian yang dilakukan oleh Danny dan Darussalam pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa definisi tindakan pajak agresif belum ada yang diterima secara universal. Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini juga belum ada definisi yang jelas mengenai perencanaan pajak, agresivitas pajak, dan penghindaran pajak.<sup>48</sup>

Terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu seperti Frank, Lynch, dan Rego yang menjelaskan tindakan agresif pajak adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba

---

<sup>48</sup>Danny, Darussalam, "Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, dan Anti Tax Avoidance", *InsideTax Media Tren Perpajakan Indonesia*, September 2007, hal. 1-25, dikutip oleh Pratama Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, "Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif", *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.

fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*<sup>49</sup> (upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya).

Sedangkan Timothy menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara, salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *legal tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan, kemudian cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.<sup>50</sup>

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan pengurangan pajak dengan strategi tertentu baik secara legal maupun ilegal.

#### **b. Peraturan Perpajakan di Indonesia**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

---

<sup>49</sup>Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Rego, "*Tax Reporting Aggressiveness...*", h. 467-496.

<sup>50</sup>Yeung Chi Kwan Timothy, "*Effects of corporate governance...*", h. 1.



yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>51</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 merupakan perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sejak tahun 2010 tarif PPh untuk Badan di Indonesia adalah sebesar 25%. Terjadi penurunan tarif PPh Badan, sebelumnya tarif PPH Badan di Indonesia pernah berlaku sebesar 28%. Tarif ini dihitung dari penghasilan neto.<sup>52</sup>

Sebagai subjek pajak dalam negeri, Badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir ketika Badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada Badan atas penghasilan yang didapatkan, mekanisme yang umum digunakan yaitu penghitungan pada penghasilan kena pajak dan penghitungan PPH terutang sesuai ketentuan Undang-Undang berlaku.

---

<sup>51</sup>Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 3.

<sup>52</sup>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b.

#### 4. Variabel Kontrol

##### a. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan atau dihubungkan dengan modal sendiri.<sup>53</sup> Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas adalah *return on equity* (ROE) dan *return on assets* (ROA).<sup>54</sup>

ROA merupakan rasio yang paling disoroti dalam analisis laporan keuangan, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas karena kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan ETR, sehingga ROA memiliki hubungan yang positif dengan ETR. Akan tetapi seiring adanya dampak reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak statutori, hubungan ROA dengan ETR menjadi negatif.<sup>55</sup>

##### b. Leverage

Tingkat *leverage* perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena *leverage* merupakan alat untuk

---

<sup>53</sup>Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 330.

<sup>54</sup>Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 271.

<sup>55</sup>Maretta Yoehana, "Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*....", h. 32.

mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. *Leverage* dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Dalam hal ini dapat dirujuk bahwa beban bunga dapat dikurangkan untuk tujuan pemungutan pajak, sementara dividen tidak. Oleh karena itu ETR berhubungan terbalik dengan *leverage*.<sup>56</sup>

### c. *Capital Intensity*

*Capital intensity* atau intensitas persediaan menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, digunakan untuk penyediaan barang dan jasa maupun disewakan kepada pihak lain dimana penggunaannya lebih dari satu periode. *Capital intensity* memiliki hubungan negatif dengan ETR, Hal ini karena perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap diperbolehkan menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan kena pajak.<sup>57</sup>

## 5. CSR dan Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

### a. CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam

<sup>56</sup>Ana Gabriela Costa, Francisco Vitorino Martins, Elísio Brandão, “*Effective Tax Rate In Portugal: Determinants And Financial Reporting Impact*”, SSRN (November 2012), h. 1-28.

<sup>57</sup>Grant Richardson dan Roman Lanis, “*Determinants of The Variability....*”, h. 689-704.

Ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.. Pondasi ekonomi Islam dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>58</sup>

Ekonomi Islam memiliki aksioma prinsip etika bisnis Islam, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Prinsip kesatuan/ tauhid/ keesaan yang merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis.
- 2) Prinsip keadilan/ keseimbangan yang berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:


 ﴿تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ الْمُسْتَقِيمُ بِالْقِسْطِ ۚ وَزِنُوا كَلِمَةً إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”<sup>60</sup>  
(QS. Al-Isra': 35)

- 3) Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran.
- 4) Prinsip kehendak bebas/ kebebasan, yaitu kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis kecuali yang dilarang. Hal ini berkenaan dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

﴿فِيهَا يُفْسَدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَُوا خَلِيفَةً ۖ الْأَرْضُ فِي جَاعِلٍ ۖ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  
 ﴿تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدُكَ تُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْ

<sup>58</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*..., h.10.

<sup>59</sup>Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 53-62.

<sup>60</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 285.

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>61</sup> (QS. Al-Baqarah: 30)

- 5) Prinsip tanggung jawab bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah Swt. atas perilaku bisnisnya.

Sebagian besar ulama terkemuka ekonomi Islam seperti Chapra pada tahun 2008 juga mengatakan bahwa ada tambahan aksioma tauhid dalam memahami prinsip-prinsip Islam. Aksioma tambahan yang disebutkan yaitu yang memiliki unsur-unsur *Rububiyyah* (keesaan tuhan), *Adl* (keadilan), *Tazkiyyah* (pemurnian dan pengembangan), dan *Ukhuwwah* (persaudaraan).<sup>62</sup>

Karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *al-mawsu'ah al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah* yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt. dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya.
- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral.
- 3) Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan.
- 4) Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>62</sup>M. Umer Chapra, “*The Maqasid Al-Shariah and the role of the financial system in their realization*”, (Paper presented at the Eighth Harvard University Islamic Finance Forum Harvard University, 2008), dikutip oleh Azlan Amran, et. al. “*Social responsibility disclosure in Islamic banks: a comparative study of Indonesia and Malaysia*”. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 15 No. 1 (2017), h. 99-115.

<sup>63</sup>Nurul Huda, et. al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 6-10.



- 5) Bimbingan konsumsi, tidak melampaui kebutuhan dan kehalalan.
- 6) Petunjuk investasi, meliputi proyek yang baik, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan, memelihara dan menumbuhkan kembangkan harta, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat.
- 7) Zakat sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.
- 8) Larangan riba<sup>64</sup>

CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari perilaku ekonomi. CSR dalam perspektif Islam tidak bisa lari dari kedelapan karakteristik tersebut. Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun diakhirat. Dalam ekonomi, konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.<sup>65</sup> Hal ini seperti yang di firmankan Allah dalam ayat berikut:

— اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا وَأَحْسَنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ إِيَّاكَ فِيمَا وَأَبْتَغِ  
 ۞ الْمُفْسِدِينَ تُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْتَغِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

<sup>64</sup>Larangan riba tercantum secara tegas dan jelas dalam Q.S. Ar-Rum: 39, An-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, dan Al-Baqarah: 278-279.

<sup>65</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 32.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>66</sup> (Al-Qasas: 77)

Hadirnya CSR yaitu untuk mewujudkan adanya kesejahteraan. Bagi umat Islam yang meyakini ke Agungan Allah, tentu juga menerapkan CSR untuk tujuan *falah*. Penerapan CSR dalam perspektif ekonomi Islam harus sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebenarnya CSR dalam kajian perspektif Islam lebih dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR), namun penelitian ini tetap menggunakan CSR sebagai variabel penelitian, karena sampel yang digunakan tidak hanya perusahaan yang bersifat syari'ah, sedangkan Indeks ISR hanya menggunakan item-item indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah, dan juga karena pengembangan item-item indeks ISR yang masih kurang detail dan komprehensif.<sup>67</sup>

Zain et. al pada tahun 2014 menyarankan kerangka CSR Islam berdasarkan konsep tauhid dan ibadah. Kerangka yang diusulkan yaitu berupa penyesuaian dengan prinsip-prinsip *Maqasid al Syariah*<sup>68</sup> dan masalah dalam memberikan aturan dan strategi CSR, dalam kebijakan dan prakteknya. Tauhid mengacu pada semua aktivitas tindakan baik secara fisik maupun mental untuk

---

<sup>66</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Madinatul Ilmi, 2012), h. 394.

<sup>67</sup>Khusnul Fauziah, Prabowo Yudho J., “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial....”, h. 12-20.

<sup>68</sup>Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 43. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsaniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

patuh dan berserah diri kepada Allah Swt..<sup>69</sup>Pemegang mutlak dari segala sesuatu di bumi dan di alam semesta adalah Allah dan manusia bertanggung jawab kepada Allah Swt..

Allah sebagai pemilik atas segala sesuatu mempercayakan umat manusia untuk memanfaatkan sumberdaya yang telah disediakan. Sebagai imbalan atas penggunaan sumberdaya, manusia harus bertanggung jawab terhadap penggunaannya.

Sebagai khalifah dan pemelihara hubungan antar manusia, adalah penting untuk memastikan semua orang hidup dalam damai satu sama lain. Selain itu, fokus hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah untuk kelangsungan hidup. Dalam pandangan *Maqasid al Syariah* dan masalah, kebijakan praktik CSR harus dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam dengan tujuan akhir melindungi *Maqasid al Syariah*.<sup>70</sup>

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 30 manusia hidup di dunia diberikan tugas dan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan berbagai perbedaan *skill* dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang natural. Perbedaan melahirkan beberapa hikmah diantaranya mengenai perbedaan *economic return* atau kesenjangan pendapatan dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Ini merupakan ujian bagi manusia dan masyarakat itu sendiri, yaitu untuk mengelola perbedaan tersebut sehingga tercipta

---

<sup>69</sup>Mustaffa Mohamed Zain et. al, “Corporate Ibadah: an Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility”. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 22 No. 2 (2014), h. 225-232.

<sup>70</sup>Azlan Amran, et. al. “Social responsibility disclosure in Islamic banks ....”, h. 99-115.

harmonisasi dan bukan permusuhan antara satu dengan lainnya. Kesenjangan/perbedaan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar. Agar distribusi ekonomi berjalan secara merata dan lancar, harta tidak boleh berputar ditangan segelintir kelompok. Prinsip ekonomi Islam yang perlu ditekankan dalam hal ini yaitu bahwa pada harta seseorang terdapat bagian milik mutlak orang lain yang dapat dilepaskan salah satunya melalui ibadah zakat.<sup>71</sup>

Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Zakat juga dapat berperan dalam pendanaan pembangunan ekonomi. Namun, pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak negara. Dalam perspektif syariah, hukum asal pajak adalah mubah (boleh).<sup>72</sup> Pemberlakuan Undang-Undang pajak oleh negara yang mengatur bahwa pajak adalah hutang bagi wajib pajak lah yang membuat pembayaran pajak harus dipenuhi.

Islam memandang sumber daya sebagai amanah Alloh kepada manusia untuk dimanfaatkan secara baik dan boleh dimiliki secara pribadi sebagai penggerak ekonomi. Sifat kepemilikan yaitu sebagai kapital produktif yang penggunaannya dialokasikan untuk kesejahteraan orang banyak. Kemudian kegiatan ekonomi juga harus dilaksanakan atas dasar iman kepada Alloh

---

<sup>71</sup>Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 36-39.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 182.

dengan pertanggungjawaban berupa pembayaran zakat yang sesuai nisab dan tidak melakukan riba dalam segala bentuk.<sup>73</sup>

Penerapan CSR juga erat kaitannya dengan konsep hipotesis daur hidup Metwally pada tahun 1995 yang berpendapat bahwa konsumsi tidak saja bergantung pada pendapatan rumah tangga saat ini, tapi juga pada kekayaan dan pendapatan yang diharapkan di masa mendatang. Konsumen akan mendistribusikan sumber daya yang ada untuk mengatur konsumsi selama hidupnya, karena itu konsumsi harus dihubungkan dengan kehidupan individu dan tidak untuk satu periode saja.<sup>74</sup>

Hipotesis daur-hidup bisa dilaksanakan dengan peran pemerintah yaitu melalui kebijakan zakat. Di Indonesia penerapan kebijakan zakat (dalam penelitian ini pendapatan), lebih di tekankan pada penerapan pajak.



#### **b. Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Penerapan pajak di masyarakat juga perlu religiusitas. Pajak yang seringkali dianggap beban oleh wajib pajak hingga mereka melakukan strategi-strategi pengurangan atau penghindaran pajak memiliki keterkaitan dengan tingkat religiusitas. Hal ini dapat dilihat dari bagaimanaketerkaitan religiusitasterhadap moral dan kepatuhan tidak terkecuali juga moral dan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak.

---

<sup>73</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 2.

<sup>74</sup>M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), h.57 di kutip oleh Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam....*, h. 107.



Sebagian besar ulama memakai istilah *dharibah* sebagai persamaan dari pajak. *Dharibah* sendiri memiliki arti yang beragam, namun dalam hal ini *dharibah* diartikan sebagai beban tambahan setelah zakat yang dipikulkan kepada kaum muslimin.

Pilihan kewajiban pajak sebagai solusi dari *gap* pendapatan melahirkan perdebatan di kalangan para *fuqaha* dan ekonom Islam. Sejumlah *fuqaha* dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

- 1) Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqadimah*, mengutip sebuah surat dari

Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi:

“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.”<sup>75</sup>

- 2) M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan:

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi,

---

<sup>75</sup> Ibnu Kaldun, *Muqadimah*, h. 308 dalam M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995M, Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islamic dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 296 dikutip oleh Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 157.

distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis: “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.”<sup>76</sup>

3) Ibnu Taimiyah, dalam *Majmuatut Fatwa*, mengatakan:

“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”<sup>77</sup>

Sebagian *fuqaha* menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak disamping zakat, diantaranya yaitu DR. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan:

“Pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama ‘pada umumnya tidak sah’. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.”<sup>78</sup>

Pajak diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan umat, sebagaimana ushul fiqh mengatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya."

<sup>76</sup>M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995M, Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islamic dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 294, *Ibid.*, h.157.

<sup>77</sup>Ibnu Taimiyah, dalam *Majmuatut Fatawa* (1338H/1963), vol.30, h. 339 dalam M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995M, Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islamic dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 297, *Ibid.*, h. 157.

<sup>78</sup>Hasan Turobi, *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, dalam M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995M, Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islamic dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 297, *Ibid.*, h. 158.

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.<sup>79</sup>

Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila memenuhi tiga kriteria:<sup>80</sup>

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku, disesuaikan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Torgler dengan mengambil tiga puluh dua negara sebagai sampel, Torgler menyatakan bahwa faktor religiusitas secara signifikan meningkatkan moral pajak. Variabel moral pajak diukur oleh Torgler dengan menggunakan indikasi pertanyaan apakah individu tersebut pernah melakukan kebohongan, yaitu dengan mengklaim tunjangan yang diberikan pemerintah, padahal ia tak berhak untuk menerimanya; kecurangan, yaitu

---

<sup>79</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 160.

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 162.

dengan tidak membayar tarif di angkutan umum; membeli barang curian sementara orang tersebut tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil curian.<sup>81</sup>

Penelitian yang menghubungkan antara religiusitas dan kepatuhan pajak telah dilakukan, salah satunya oleh Mohdali yang diungkapkan oleh Pertiwi. Mohdali meneliti tentang pengaruh religiusitas masyarakat Muslim di Turki terhadap kepatuhan pajak. Mohdali membedakan variabel religiusitas ke dalam dua tipe, religiusitas interpersonal dan religiusitas intrapersonal. Religiusitas interpersonal berkaitan dengan keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan. Mohdali menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk religiusitas intrapersonal dan tidak untuk religiusitas interpersonal.<sup>82</sup>

Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi menyimpulkan bahwa dalam agama Islam, menghindari pajak dengan cara melakukan kecurangan atau kebohongan (agresivitas pajak) diyakini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Selama pajak yang diwajibkan oleh negara diambil secara adil dan memenuhi syarat maka warga negara wajib memenuhinya dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang CSR dan agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun masih sedikit penelitian yang mengkaitkan antara pengungkapan CSR

---

<sup>81</sup>Benno Torgler, *The Importance Of Faith : Tax Morale And Religiosity. Journal Of Economic Behavior and Organization*, Vol. 61 (2006), h.81–109.

<sup>82</sup>Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, "Moral Pajak: Sebuah Opsi....", h. 12-25.

yang dilakukan perusahaan dengan agresivitas pajak khususnya di Indonesia. Kemudian, penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak juga belum di jelaskan dari perspektif ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak:

Pertama, Timothy pada tahun 2010 melakukan penelitian berjudul “*Effect of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*” memberikan bukti bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di *Hongkong Stock Exchange* dengan menggunakan analisis regresi. Variabel dependen dalam penelitian adalah agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang diproksikan dalam jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, dewan direksi independen, kekuatan *shareholder*, kekuatan *shareholder* minoritas, dan tarif pajak.<sup>83</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012 yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*” memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik Australia yang terdaftar dalam *Aspect-Huntley Financial Database* periode tahun 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diproksikan dalam

---

<sup>83</sup>Yeung Chi Kwan Timothy, “*Effects of corporate governance....*”, h. 1-27.



CSR *disclosure* yang terbagi dalam lima puluh dua *item*. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang diproksikan dalam dua proksi ETR (*Effective Tax Rates*). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan direksi yang independen (BODI), *trouble* (TROUBLE), umur perusahaan (AGEPUB), struktur kepemilikan saham oleh manajemen (MTOBOD), CEO *tenure* (CEOTENURE), CEO *duality* (CEODUAL), kepemilikan saham oleh minoritas (BLOCKHLD), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (Lev), *capital intensity* (CINT), *inventory intensity* (INVINT), *research and development intensity* (RDINT), pertumbuhan perusahaan (MKTBK), profitabilitas (ROA), dan sektor industri (INDSEC).<sup>84</sup>

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak sudah pernah dilakukan salah satunya oleh Pradnyadari dan Rohman yang diterbitkan dalam jurnal di tahun 2015. Penelitian ini memberikan bukti bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan CSR dalam aktivitas operasinya, maka semakin rendah keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayar. Sampel penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 yang secara *continue* mengungkapkan CSR dan memiliki ETR antara 0 hingga 1. Perolehan sampel akhir yaitu seratus enam puluh tujuh

---

<sup>84</sup>Grant Richardson, Grantley Taylor, Roman Lanis, “*Corporate social responsibility and tax aggressiveness....*, h. 68-88.

perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel independennya adalah *Corporate Social Responsibility*. Penelitian menggunakan variabel kontrol antara lain profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage*(Lev), *capital intensity* (CAPT) dan *inventory intensity* (INVT).<sup>85</sup>

Kemudian, Laguir, Stagliano, dan Elbaz pada tahun 2015 melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan “*Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness?*”. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, sedangkan aktivitas tinggi dalam dimensi ekonomi dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Sampel diambil dari *database* Vigeo untuk perusahaan Prancis untuk periode 2003-2011. Sampel akhir setelah dilakukan pengklasifikasian, terdiri dari delapan puluh tiga pengamatan dari dua puluh empat perusahaan. Model teoritis yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada premis bahwa dimensi yang berbeda dari CSR memiliki efek yang berbeda pada agresivitas pajak. Dengan demikian, agresif pajak digunakan sebagai variabel dependen dan empat dimensi CSR sebagai variabel independen yaitu, sosial, pemerintahan, ekonomi, dan dimensi lingkungan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>I Dewa Ayu Intan Pradnyadari, Abdul Rohman, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*....”, h. 1-9.

<sup>86</sup>Issam Laguir, Raffaele Stagliano, Jamal Elbaz, “*Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness?*”, *Journal of Cleaner Production*, 107 (2015), h. 662-675.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, Mangoting, dan Widuri pada Mei 2019 tentang Apakah *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan memberikan kesimpulan bahwa nilai ETR yang tinggi menyebabkan nilai perusahaan tinggi. Perusahaan yang cenderung tidak melakukan penghindaran pajak mendapatkan respon positif dari para investor. Pada sisi yang lain, CSR dalam penelitian ini tidak berhasil memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang menerbitkan laporan tahunan berkelanjutan periode 2013-2016. Variabel yang diuji pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, CSR sebagai variabel moderasi, dan total akrual, laba bersih, hutang jangka panjang, penjualan sebagai variabel kontrol.<sup>87</sup>

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Tinjauan Pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Variabel dan Analisis	Hasil
1.	Timothy	<i>Effect of Corporate Governance on Tax Aggressiveness</i>	2010	Variabel dependen: agresivitas pajak menggunakan proksi ETR. Variabel	Tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak.

<sup>87</sup>Adhityawati Kusumawardhani, Yenni Mangoting, Retnaningtyas Widuri, “Apakah *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan”, *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 14 No. 1 (Mei 2019), h. 45-64.

				independen: tata kelola (jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, dewan direksi independen, kekuatan <i>shareholder</i> , kekuatan <i>shareholder</i> minoritas, dan tarif pajak). Menggunakan analisis regresi.	
2.	Lanis dan Richardson	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis</i>	2012	Variabel dependen: agresivitas pajak menggunakan proksi ETR. Variabel independen: CSR Menggunakan analisis regresi Tobit.	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.
3.	Pradnyadari dan Rohman	Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak	2015	Variabel dependen: agresivitas pajak menggunakan proksi ETR. Variabel independen: CSR Variabel control: profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE),	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

				<i>leverage (Lev), capital intensity (CAPT) dan inventory intensity (INVT) menggunakan analisis regresi linear berganda.</i>	
4.	Laguir, Stagliano, dan Elbaz	<i>Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness?</i>	2015	Variabel dependen: Agresivitas pajak menggunakan proksi ETR. Variabel Independen: CSR menggunakan <i>Data analysis e partial least squares.</i>	Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, sedangkan aktivitas tinggi dalam dimensi ekonomi dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi.
5.	Kusumawardhani, Mangoting, dan Widuri	Apakah <i>Corporate Social Responsibility</i> Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak?	2019	Variabel dependen: nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q Variabel independen: Penghindaran pajak	Perusahaan yang cenderung tidak melakukan penghindaran pajak mendapatkan respon positif

		ran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan		<p>diproksikan dengan rasio ETR.</p> <p>Variabel moderasi: CSR diukur menggunakan pedoman pelaporan GRI versi 3,0.</p> <p>Variabel kontrol: laba bersih, hutang jangka panjang, penjualan bersih dan ukuran perusahaan. Dilakukan dengan model <i>Moderated Regression Analysis</i>.</p>	<p>dari para investor. CSR dalam penelitian ini tidak berhasil memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.</p>
--	--	-------------------------------------	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

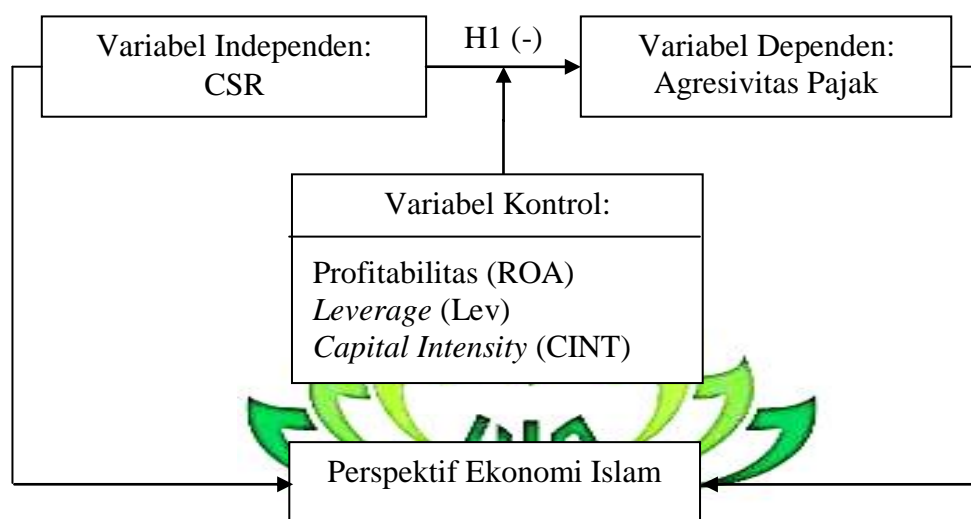
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini akan menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), variabel independennya adalah *Corporate Social Responsibility*, dan yang menjadi variabel kontrolnya yaitu profitabilitas (ROA), *leverage* (Lev), dan *capital intensity* (CAPT). Kemudian hubungan antara CSR dan agresivitas pajak ini juga akan dikaji menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun penggunaan



variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu untuk membatasi pengaruh variabel lain diluar penelitian terhadap variabel dependen.

Keterkaitan variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

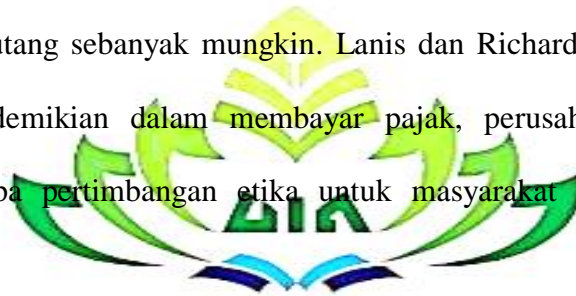


#### **D. Hipotesis**

Perusahaan merupakan salah satu subjek wajib pajak yang berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan masyarakat luas. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima masyarakat. Salah satunya ditunjukkan oleh kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dengan penuh kesadaran dan tidak berupaya untuk melakukan aktifitas agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Hal ini didukung oleh teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak aktivitas

operasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan *shareholder* saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, *supplier*, analis, dan lain sebagainya.

Pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin perusahaan tersebut akan memiliki tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Lanis dan Richardson berpendapat bahwa dengan demikian dalam membayar pajak, perusahaan seharusnya memiliki beberapa pertimbangan etika untuk masyarakat dan *stakeholder* lainnya.<sup>88</sup>



Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata *stakeholder*-nya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

---

<sup>88</sup>Grant Richardson, Grantley Taylor, Roman Lanis, “*Corporate social responsibility and tax aggressiveness....*”, h. 68-88.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Cet. Ke-3*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Doddy, Moch. Ariefianto. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert. *Bisnis*, Edisi ke Delapan, Jilid 1, terjemahan Sita Wardhani. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Gudono. *Teori Organisasi*, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Harahap, Isnaini, et. al.. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Huda, Nurul et. al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Penerbit Madinatul Ilmi, 2012.
- Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kuncoro, Mudrajat. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

- \_\_\_\_\_. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicaksana. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Cet. 1 (E-Book). Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Sanusi, Anwar. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-mana*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.

### **Jurnal dan Penelitian Ilmiah**

- Amran, Azlan, et. al., *Social Responsibility Disclosure in Islamic Banks: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia*, *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 15 No. 1, 2017.
- Branco, Manuel Castelo dan Lúcia Lima Rodrigues, *Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility*, *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, Vol. 12 No. 1, 2007.
- Costa, Ana Gabriela, Francisco Vitorino Martins dan Elísio Brandão, *Effective Tax Rate In Portugal: Determinants And Financial Reporting Impact*, *SSRN*, November 2012.
- Fatmawatie, Naning, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Akuntansi Sosial Ekonomi di Tinjau dari Syariah*, *Equilibrium*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho J, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, Maret 2013.
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch dan Sonja Olhott Rego, *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relations to Aggressive Financial Reporting*, *The Accounting Review*, Vol. 84 No. 2, Maret 2009.

- Hidayati, Naila Nuur dan Sri Murni, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Earnings Response Coefficient* pada Perusahaan *High Profile*, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11 No. 1, April 2009.
- Jessica, Agus Rianto Toly, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak, *Tax and Accounting Review*, Vol. 4 No.1, 2014.
- Kusumawardhani, Adhityawati, Yenni Mangoting dan Retnaningtyas Widuri, Apakah *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan, *DeReMa Jurnal Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Mei 2019.
- Laguir, Issam, Raffaele Stagliano dan Jamal Elbaz, *Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness?*, *Journal of Cleaner Production*, 107, 2015.
- Lisbet, Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional, *Politica*, Vol. 4 No. 1, Mei 2013.
- Mangoting, Yenni, *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1 No. 1, Mei 1999.
- Midiastuty, Pratama Puspa dan Eddy Suranta, Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif, *Simposium Nasional Akuntansi XIX* Lampung, 2016.
- Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri, Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim, *Jurnal Al Qardh*, Vol. 5 No. 1, Juli 2017.
- Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Richardson, Grant dan Roman Lanis, *Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform: Evidence From Australia*, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 26, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*, *J. Account and Public Policy*, Vol.32, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 No. 1, 2013.

- Sari, Rizkia Anggita, Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Nominal*, Vol. I No.I, 2012.
- Sembiring, Eddy Rismanda, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Maksi*, Vol. 6 No. 1, Januari 2006.
- Sholihin, Muhammad Rijalus, Harnovinsah dan Yoosita Aulia, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2 No. 2, September 2018.
- Sopyan, Yayan, *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, *Ahkam*, Vol. XIV No. 1, Januari 2014.
- Suharto, Edi, Menggagas Standar Audit Program CSR, Disampaikan pada 6<sup>th</sup> Round Table Discussion Menggagas Standar Audit Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas, Asosiasi Auditor Internal (AAI), Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008.
- Timothy, Yeung Chi Kwan, *Effects of corporate governance on tax aggressiveness*. Accounting Major An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours) Hong Kong Baptist University Hong Kong, 2010.
- Torgler, B, *The Importance Of Faith: Tax Morale And Religiosity*, *Journal Of Economic Behavior & Organization*, Vol. 61, 2006.
- Watson, L, *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Earnings Performance*, *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 37 No. 2, 2014.
- Yoehana, Maretta, *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013.
- Zain, M.M., et. al., *Corporate Ibadah: an Islamic Perspective of Corporate Social Responsibility*, *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 22 No. 2, 2014.

## **Peraturan dan Undang-Undang**

Direktorat Jendral Anggaran. *Informasi APBN 2019 Republik Indonesia*.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Sumber On-line**

Agregasi Solopos. “Diduga Gelapkan Pajak, Begini Penjelasan Adaro”. (On-line), tersedia di <https://economy.okezone.com/read/2019/07/05/278/2074874/diduga-gelapkan-pajak-begini-penjelasan-adaro> (26 Februari 2020)

Global Witness. “Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia”. (On-line), tersedia di <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pergeseran-uang-yang-misterius-dari-industri-batu-bara-indonesia/> (26 Februari 2020).

GRI. “*About GRI*”. (On-Line), dapat diakses di <https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx> (1 Mei 2020).

Indeks Harga Saham”. (On-line), tersedia di: <https://www.idx.co.id/produk/indeks/> (9 Februari 2020).

Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi”. (On-line), tersedia di: <https://tafsirq.com/topik/manusia+sebagai+khalifah+di+muka+bumi> (15 Februari 2020).

PT Adaro Energy Tbk. “*Annual Report*”. tersedia di <http://www.adaro.com/pages/read/10/42/Laporan%20Tahunan> (26 Februari 2020).

Saham di BEI”. (On-line), tersedia di: <http://yuknabungsaham.idx.co.id/daftar-saham-detail> (9 Februari 2020).

Suprpto, Yitno, Suryadi. “Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran”. (On-line), dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/01/27/mengulas-karhutla-jambi-2019-awal-tahun-riau-mulai-kebakaran/> (26 Februari 2020).

Taufik Wijaya, “Reklamasi Lahan Tak Efektif. Bentang Alam yang Berubah Pasca Pertambangan Batubara di Sumsel (Bagian-2)” (On-line), dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2017/05/05/reklamasi-lahan-tak-efektif-bentang-alam-yang-berubah-pasca-pertambangan-batubara-di-sumsel-bagian-2/> (9 Maret 2020).

Tiga Produsen Makanan Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak di Indonesia” (On-line), dapat diakses di <https://kumparan.com/kumparansains/3-produsen-makanan-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-di-indonesia-1sEr7i1YEMd> (9 Maret 2020).

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 2

### Data ETR, CSR, ROA (Profitabilitas), Leverage, dan Capital Intensity

No	Perusahaan	Tahun	ETR	CSR	ROA	LEV	CINT	
1	1	ADRO	2010	0,52845769	0,443037975	5,46	0,54537877	0,216503632
2		ADRO	2011	0,449334815	0,556962025	9,76	0,568432615	0,253102822
3		ADRO	2012	0,462947811	0,632911392	5,73	0,552459739	0,264337766
4		ADRO	2013	0,453203592	0,64556962	3,4	0,525434251	0,254750819
5		ADRO	2014	0,430280434	0,64556962	2,86	0,49180837	0,252048219
6		ADRO	2015	0,460651464	0,670886076	2,53	0,437279448	0,246216202
7		ADRO	2016	0,376626693	0,670886076	5,22	0,419544185	0,23675654
8		ADRO	2017	0,422893913	0,670886076	7,87	0,39953937	0,221091943
9		ADRO	2018	0,452583301	0,683544304	6,76	0,390618709	0,227978594
10	2	ASII	2010	0,191479245	0,291139241	15,07	0,483434789	0,196186324
11		ASII	2011	0,182174453	0,291139241	13,73	0,50856343	0,187812259
12		ASII	2012	0,184816116	0,379746835	12,48	0,507258303	0,18832088
13		ASII	2013	0,189877557	0,379746835	10,42	0,50378048	0,176930194
14		ASII	2014	0,191101199	0,417721519	9,37	0,490791308	0,174768141
15		ASII	2015	0,204635762	0,417721519	6,36	0,484454132	0,169910567
16		ASII	2016	0,177549095	0,443037975	6,99	0,46571194	0,1651181
17		ASII	2017	0,206569393	0,46835443	7,84	0,470963053	0,163614238
18		ASII	2018	0,208497333	0,46835443	7,94	0,494176281	0,167482326
19	3	BBCA	2010	0,204068441	0,240506329	2,61	0,893446433	0,010501716
20		BBCA	2011	0,205669269	0,278481013	2,83	0,888080879	0,010852496
21		BBCA	2012	0,202068412	0,35443038	2,65	0,746131436	0,005787798
22		BBCA	2013	0,199789275	0,367088608	2,87	0,871638518	0,014974393
23		BBCA	2014	0,20391622	0,379746835	2,99	0,85957261	0,015989951
24		BBCA	2015	0,203968873	0,392405063	3,03	0,844495995	0,016339949
25		BBCA	2016	0,201512392	0,430379747	3,05	0,828320655	0,025106934
26		BBCA	2017	0,200200434	0,481012658	3,11	0,819571025	0,022482349
27		BBCA	2018	0,205986893	0,506329114	3,13	0,810437136	0,023444694
28	4	BBNI	2010	0,251986524	0,367088608	1,65	0,866644724	0,015439982
29		BBNI	2011	0,221554987	0,455696203	1,94	0,873459317	0,013551571
30		BBNI	2012	0,208010237	0,53164557	2,11	0,869412442	0,013775997
31		BBNI	2013	0,196860394	0,556962025	2,34	0,8520611	0,014259667
32		BBNI	2014	0,199265693	0,64556962	2,6	0,818939476	0,014936252
33		BBNI	2015	0,202824523	0,683544304	1,8	0,811505114	0,040811613

34		BBNI	2016	0,202246257	0,708860759	1,89	0,81703993	0,036436254
35		BBNI	2017	0,197769791	0,721518987	1,94	0,823434436	0,032149615
36		BBNI	2018	0,200674712	0,721518987	1,87	0,830151844	0,032311912
37	5	BBRI	2010	0,230466326	0,303797468	2,84	0,909289102	0,003880784
38		BBRI	2011	0,195559153	0,35443038	3,21	0,89397658	0,003943011
39		BBRI	2012	0,216776395	0,35443038	3,39	0,882319156	0,005086484
40		BBRI	2013	0,234887872	0,594936709	3,41	0,872904926	0,006345006
41		BBRI	2014	0,214044926	0,64556962	3,02	0,878169875	0,007378537
42		BBRI	2015	0,217985661	0,658227848	2,89	0,871216086	0,009151912
43		BBRI	2016	0,227992919	0,670886076	2,61	0,853170928	0,02462805
44		BBRI	2017	0,215487796	0,683544304	2,58	0,850983944	0,021954047
45		BBRI	2018	0,192031842	0,696202532	2,5	0,85713966	0,020753253
46	6	BMRI	2010	0,329436203	0,291139241	2,08	0,850321767	0,011679311
47		BMRI	2011	0,231113246	0,341772152	2,3	0,817877396	0,010960929
48		BMRI	2012	0,217547391	0,379746835	2,52	0,816064352	0,011017124
49		BMRI	2013	0,217435726	0,46835443	2,57	0,813989472	0,010429137
50		BMRI	2014	0,205830087	0,64556962	2,42	0,815189805	0,010442622
51		BMRI	2015	0,197843943	0,658227848	2,32	0,808953198	0,010726382
52		BMRI	2016	0,211210326	0,721518987	1,41	0,793833761	0,034334345
53		BMRI	2017	0,210400627	0,734177215	1,91	0,789567127	0,03255866
54		BMRI	2018	0,208206125	0,759493671	2,15	0,783490505	0,03197557
55	7	GGRM	2010	0,251541919	0,17721519	13,71	0,306470021	0,240931278
56		GGRM	2011	0,250472602	0,189873418	12,68	0,371917591	0,209520397
57		GGRM	2012	0,264333497	0,202531646	9,8	0,359042504	0,250288965
58		GGRM	2013	0,261492361	0,215189873	8,63	0,421095631	0,291282931
59		GGRM	2014	0,25126158	0,215189873	9,27	0,431015475	0,325809345
60		GGRM	2015	0,252735553	0,215189873	10,16	0,40150127	0,316610617
61		GGRM	2016	0,252874214	0,278481013	10,6	0,371513883	0,32563015
62		GGRM	2017	0,256902402	0,278481013	11,62	0,36806908	0,32068001
63		GGRM	2018	0,257495307	0,278481013	11,28	0,346814739	0,329370101
64	8	INDF	2010	0,275674452	0,17721519	8,32	0,475522906	0,248106716
65		INDF	2011	0,229947505	0,240506329	9,13	0,411697494	0,240927136
66		INDF	2012	0,242530773	0,253164557	8,06	0,425146	0,266128681
67		INDF	2013	0,268284394	0,265822785	4,38	0,525776859	0,285912188
68		INDF	2014	0,293486889	0,316455696	5,99	0,532115657	0,25537636
69		INDF	2015	0,348718603	0,316455696	4,04	0,530427132	0,27328678
70		INDF	2016	0,342947706	0,392405063	6,41	0,463900137	0,424751814
71		INDF	2017	0,328193938	0,405063291	5,85	0,467168567	0,446740896
72		INDF	2018	0,324002282	0,405063291	5,14	0,482929981	0,439084356

73	9	INTP	2010	0,240979354	0,291139241	21,01	0,157523589	0,501935144
74		INTP	2011	0,235047437	0,303797468	19,84	0,133179214	0,420799114
75		INTP	2012	0,236581484	0,924050633	20,93	0,146622656	0,34872196
76		INTP	2013	0,240003493	0,924050633	18,84	0,144770764	0,349671558
77		INTP	2014	0,223222657	0,962025316	18,26	0,149131952	0,420418399
78		INTP	2015	0,228241748	0,962025316	15,76	0,136491818	0,499808672
79		INTP	2016	0,066578574	0,962025316	12,84	0,133061354	0,48568535
80		INTP	2017	0,187138575	0,974683544	6,44	0,149224548	0,518972462
81		INTP	2018	0,188799571	0,974683544	4,12	0,164347223	0,526734165
82	10	KLBF	2010	0,240978065	0,303797468	19,11	0,179250655	0,22826403
83		KLBF	2011	0,233639903	0,35443038	18,41	0,212533392	0,22482039
84		KLBF	2012	0,230898646	0,455696203	18,85	0,217277858	0,239411077
85		KLBF	2013	0,234038724	0,46835443	17,41	0,250897381	0,258454243
86		KLBF	2014	0,232469492	0,46835443	17,07	0,215058194	0,273686305
87		KLBF	2015	0,243739803	0,46835443	15,02	0,20137612	0,287556515
88		KLBF	2016	0,239488507	0,481012658	15,44	0,181410771	0,29920881
89		KLBF	2017	0,243100753	0,620253165	14,76	0,163828142	0,321532423
90		KLBF	2018	0,240856747	0,658227848	13,76	0,157146421	0,344578977
91	11	LPKR	2010	0,17341996	0,278481013	3,68	0,49090904	0,074673216
92		LPKR	2011	0,173349174	0,303797468	4,46	0,484696322	0,085224284
93		LPKR	2012	0,16120914	0,329113924	5,32	0,538784431	0,089362293
94		LPKR	2013	0,172658884	0,341772152	5,09	0,547454152	0,089780892
95		LPKR	2014	0,151492877	0,341772152	8,3	0,534534699	0,084761479
96		LPKR	2015	0,202913226	0,367088608	2,48	0,542261311	0,066096298
97		LPKR	2016	0,212083862	0,405063291	2,69	0,515935171	0,063639772
98		LPKR	2017	0,265733265	0,443037975	1,51	0,474032393	0,067893506
99		LPKR	2018	0,18717581	0,455696203	1	0,488619678	0,108377837
100	12	PGAS	2010	0,198404995	0,82278481	20,14	0,533632197	0,519016031
101		PGAS	2011	0,200671684	0,82278481	19,75	0,447276637	0,509835933
102		PGAS	2012	0,202952341	0,911392405	23,42	0,397468225	0,433376769
103		PGAS	2013	0,205493659	0,873417722	20,49	0,369919559	0,364901249
104		PGAS	2014	0,236107614	0,835443038	12,03	0,49460661	0,31122981
105		PGAS	2015	0,091111232	0,683544304	6,2	0,534596814	0,288112231
106		PGAS	2016	0,19845244	0,708860759	4,52	0,519020275	0,343571415
107		PGAS	2017	0,463676271	0,734177215	2,35	0,473259357	0,35402657
108		PGAS	2018	0,343490587	0,759493671	4,59	0,596702287	0,360411944
109	13	PTBA	2010	0,231074568	0,329113924	22,92	0,261753025	0,105225228
110		PTBA	2011	0,239224469	0,35443038	26,84	0,29087887	0,098992013
111		PTBA	2012	0,256204451	0,417721519	22,86	0,331826405	0,145608435



112		PTBA	2013	0,246644338	0,683544304	15,88	0,352297152	0,240141282
113		PTBA	2014	0,245076318	0,82278481	13,63	0,426330586	0,268331161
114		PTBA	2015	0,235260133	0,860759494	12,06	0,450247226	0,330241672
115		PTBA	2016	0,249362976	0,848101266	10,9	0,431957077	0,327707383
116		PTBA	2017	0,254751149	0,848101266	20,68	0,372370834	0,281946746
117		PTBA	2018	0,261062544	0,848101266	21,19	0,326945721	0,270864359
118	14	SMGR	2010	0,225194558	0,962025316	23,51	0,219960566	0,492357569
119		SMGR	2011	0,222925481	0,962025316	20,12	0,256668078	0,592052045
120		SMGR	2012	0,216433234	0,962025316	18,54	0,316573333	0,631854565
121		SMGR	2013	0,226302092	0,632911392	17,39	0,294541261	0,61176192
122		SMGR	2014	0,213966869	0,594936709	16,24	0,271665883	0,58899156
123		SMGR	2015	0,226542376	0,544303797	11,86	0,280771817	0,659649418
124		SMGR	2016	0,108087681	0,53164557	10,25	0,308692352	0,697465864
125		SMGR	2017	0,256147175	0,620253165	4,17	0,387673545	0,662812396
126		SMGR	2018	0,245885354	0,683544304	6,03	0,360067914	0,6401784
127	15	UNTR	2010	0,234476198	0,341772152	13,05	0,455726985	0,371682838
128		UNTR	2011	0,242154583	0,367088608	12,7	0,407753848	0,294362398
129		UNTR	2012	0,227402808	0,46835443	11,44	0,35784989	0,302113017
130		UNTR	2013	0,271514726	0,46835443	8,37	0,378530275	0,254076253
131		UNTR	2014	0,269091847	0,582278481	8,03	0,361105884	0,225928373
132		UNTR	2015	0,333983265	0,582278481	4,52	0,364010836	0,205130911
133		UNTR	2016	0,241537259	0,658227848	7,98	0,333940859	0,188657089
134		UNTR	2017	0,270780944	0,607594937	9,33	0,422116272	0,19905708
135		UNTR	2018	0,256202951	0,594936709	9,89	0,509372377	0,211423598
136	16	UNVR	2010	0,254259919	0,278481013	38,9	0,534682096	0,476801871
137		UNVR	2011	0,25301271	0,316455696	39,73	0,648843022	0,506978899
138		UNVR	2012	0,251689987	0,405063291	40,38	0,65002856	0,554142119
139		UNVR	2013	0,252302199	0,632911392	71,51	0,679783741	0,541126014
140		UNVR	2014	0,252477425	0,632911392	40,18	0,667626659	0,514543435
141		UNVR	2015	0,252594358	0,620253165	37,2	0,693110179	0,528985766
142		UNVR	2016	0,2544613	0,620253165	38,16	0,719076575	0,5690702
143		UNVR	2017	0,252580519	0,620253165	37,05	0,726368614	0,551248563
144		UNVR	2018	0,252451877	0,658227848	46,66	0,611835033	0,544352985

### Lampiran 3

#### 79 INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR BERDASARKAN GRI Versi 3.0

INDIKATOR KINERJA EKONOMI		
a. Kinerja Ekonomi	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC 2	Implikasi finansial dan resiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti
	EC 4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
b. Keberadaan Pasar	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula ( <i>entry level</i> ) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
c. Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
	EC 9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan
INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN		
a. Material	EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran
	EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan
b. Energi	EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung
	EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung

	EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konserfasi yang lebih baik
	EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif tersebut
	EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan
	EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya
	EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air
	EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali
d. Keanekaragaman Hayati	EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi
	EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktifitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keaneka ragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi
	EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali
	EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
	EN 15	Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan
e. Emisi, Efluen, dan Limbah	EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat
	EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat

	EN 18	Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan
	EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat
	EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat
	EN 21	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasi berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah
	EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan <i>Basel Convention</i> Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara internasional
	EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada di sekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan
f. Produk dan Jasa	EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif tersebut
	EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori
g. Kesesuaian	EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup
h. Transportasi	EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain, dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya dan para pegawainya
i. Keselarasan	EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan

<b>INDIKATOR PRAKTIK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK</b>		
a. Pekerjaan	LA 1	Komposisi tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja, dan lokasi
	LA 2	Jumlah total rata-rata <i>turn over</i> tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area
	LA 3	Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap
b. Hubungan Tenaga Kerja dan Manajemen	LA 4	Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negoisasi yang dibuat secara kolektif
	LA 5	Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama
c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA 6	Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja
	LA 7	Tingkat dan jumlah kecelakaan, penyakit karena jabatan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area
	LA 8	Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka, dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius
	LA 9	Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian resmi serikat pekerja
d. Pendidikan dan Pelatihan	LA 10	Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai
	LA 11	Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk terus berkarya

	LA 12	Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas performa dan perkembangan mereka secara berkala
e. Keanekaragaman dan Kesetaraan Kesempatan	LA 13	Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas, dan indikasi keanekaragaman lainnya
	LA 14	Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai
<b>INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA</b>		
a. Praktik Investasi dan Pengadaan	HR 1	Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai HAM atau telah melalui evaluasi mengenai HAM
	HR 2	Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan
	HR 3	Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dipilih
b. Non-Diskriminasi	HR 4	Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil
c. Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok	HR 5	Prosedur kerja yang teridentifikasi ketika hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi beresiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut
d. Tenaga Kerja Anak	HR 6	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk penghapusan pekerja anak
e. Pegawai Tetap dan Kontrak	HR 7	Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, serta langkah yang diambil untuk penghapusan pegawai kontrak
f. Praktik Keselamatan	HR 8	Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja



g. Hak Penduduk Asli	HR 9	Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil
<b>INDIKATOR KINERJA KEMASYARAKATAN/ SOSIAL</b>		
a. Kemasyarakatan	SO 1	Sifat dasar, cakupan, dan keefektifan atas program dan kegiatan apapun yang menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi selama beroperasi dan pasca operasi
b. Korupsi	SO 2	Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisis memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi
	SO 3	Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi
	SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan dan korupsi
c. Kebijakan Publik	SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur melobi public
	SO 6	Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi, dan instansi terkait oleh negara tempat perusahaan beroperasi
d. Prilaku Anti Persaingan	SO 7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti <i>trust</i> , praktik monopoli dan sanksinya
e. Kepatuhan	SO 8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan
<b>INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK</b>		
a. Keselamatan dan Kesehatan Konsumen	PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut

	PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya
b. Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut
	PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk, jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya
	PR 5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan
c. Komunikasi Pemasaran	PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi, dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya
	PR 7	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya
d. Privasi Konsumen	PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang
e. Kesesuaian	PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk serta jasa

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiative*) G3 *Guideliness*



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nira Julia Ningsih  
NPM : 1551010251  
Pembimbing Akademik I : Evi Ekawati S.E. M.Si  
Pembimbing Akademik II : M. Kurniawan, SE., M.E.Sy  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)

No	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	Rabu, 13 Maret 2019	Seminar Proposal.		
2	Rabu, 13 Maret 2019	Konsultasi proposal kepada pembimbing 2.		
3	Senin, 8 April 2019	Konsultasi perubahan judul dan Acc perubahan judul oleh Pembimbing 1.		
4	Jum'at, 12 April 2019	Konsultasi perubahan judul dan Acc perubahan judul oleh pembimbing 2.		
5	Jum'at, 2 Agustus 2019	Konsultasi proposal, perbaikan landasan teori, dan Acc proposal oleh pembimbing 2.		
6	Jum'at, 13 September 2019	Perbaikan penulisan, perbaikan landasan teori, dan Acc Bab I - III oleh Pembimbing 2.		
7	Rabu, 9 Oktober 2019	Perbaikan kerangka pemikiran, variabel, metode penelitian, dan Acc Bab I - III oleh pembimbing 1.		
8	Senin, 24 Februari 2020	Perbaikan Pembahasan pada bab 4 dan beberapa kesalahan penulisan dengan pembimbing 2.		



9	Kabu, 26 Februari 2020	ACC Bab 1-5 oleh pembimbing 2 dengan perbaikan pd bagian analisis		
10	selasa, 3 Maret 2020	ACC untuk munaqasah oleh pembimbing 1		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Pembimbing Akademik I,



**Evi Ekawati S.E. M.Si**  
NIP. 197602022009122001

Bandar Lampung, 2 Agustus 2019  
Pembimbing Akademik II,



**M. Kurniawan, SE., M.E.Sy**  
NIP. 198605172015031005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131*

**PERMOHONAN PERUBAHAN JUDUL**

Kepada Yth,  
**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 12 September 2019

***Assalammu'alaikum Wr.Wb***

Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan revisi judul skripsi yang telah diajukan sebelumnya,

Nama : Nira Julia Ningsih  
NPM : 1551010251  
Semester : 9

Judul skripsi yang sebelumnya diajukan :

**“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dilihat dari Perspektif Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2018)”**

Saya bermaksud merevisi menjadi :

**“Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)”**

Demikian permohonan ini saya buat, besar harapan saya agar bapak menerima perubahan judul skripsi yang saya teliti. Atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terima kasih.

***Wassalammu'alaikum Wr.Wb***

Mengetahui,

Pembimbing I

Evi Ekawati S.E. M.Si

NIP. 197602022009122001

Pembimbing II

M. Kurniawan, SE., M.E.Sy

NIP. 198605172015031005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

**BERITA ACARA MUNAQSAH**

**I. WAKTU**

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Aplikasi Virtual (Daring)

**II. MAHASISWA**

Nama : Nira Julia Ningsih  
NPM/Prodi : 1551010251/ Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)

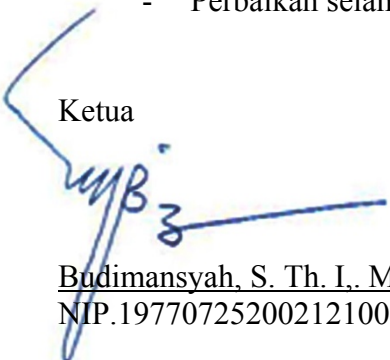
**III. TIM PENGUJI**

Ketua : Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I  
Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E.I., M.S.I  
Penguji I : Hanif, S.E., M.M.  
Penguji II : Evi Ekawati S.E.M.Si  
Pembimbing I : Evi Ekawati S.E.M.Si  
Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy  
Petugas : Ghina Ulfa S. L.c, M.E.Sy

**IV. PERISTIWA YANG PELU DICATAT**

- Nilai Ujian Munaqosah : **83.2 (A)**
- **Lulus**
- Perbaikan selama 2 Bulan

Ketua

  
Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I  
NIP.197707252002121001

Bandar Lampung, 21 April 2020

Sekretaris

Dimas Pratomo, S.E.I., M.E  
NIP. 199305282018011003



## NOTULA MUNAQOSAH

### I. WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020

Jam : 8.00 WIB

Tempat : Aplikasi Virtual (Daring)

### II. MAHASISWA

Nama : Nira Julia Ningsih

NPM/Prodi : 1551010251/ Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018)

### III. TIM PENGUJI

Ketua : Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I

Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E.I., M.E

Penguji I : Hanif, S.E., M.M.

Penguji II : Evi Ekawati S.E.M.Si

### IV. CATATAN – CATATAN

#### 1. KETUA MUNAQASAH

- Masukkan sedikit mengenai pajak dalam perspektif ekonomi Islam
- Gunakan ayat ayat yang sesuai
- Sistematika penulisan diperbaiki
- abstrak diperbaiki

#### 2. PENGUJI 1

- Kenapa yg diambil index LQ 45?
- Abstrak harus komplit dari latar belakang sampai kesimpulan
- Bagaimana laporan CSR dibuat dan bagaimana mempertanggungjawabkan kevalidannya?
- rumusan masalah diperbaiki, gunakan kata bagaimana
- Bagaimana anda mengolah data CSR jika anda tidak mempunyai data mengenai jumlah CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan?
- tujuan harus sinkron dengan rumusan masalah
- tambahkan masukan saran, semakin besar perusahaan mengeluarkan zakat maka akan semakin kecil perusahaan membayar zakat.

#### 3. PENGUJI 2

- Bagaimana pandangan Islam mengenai perilaku agresivitas pajak?
- Bagaimana pengaruh variabel kontrol terhadap agresivitas pajak? Silahkan jelaskan peran variabel kontrol

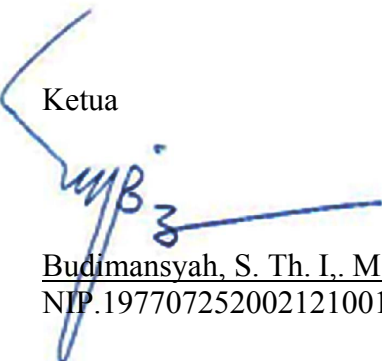
- saran untuk point 3 jangan terlalu panjang, cukup jelaskan apa yang harus dilakukan oleh regulator. Sementara saran bagi pemerintah, bahasa diperbaiki dan harus implementatif.
- Dalam saran cantumkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki CSR yang concern

V. KESIMPULAN

Nilai dari Ketua Sidang :	80 x 30%	= 24
Nilai dari Penguji 1 :	82 x 40%	= 32.8
Nilai dari Penguji 2 :	88 x 30%	= 26.4
<b>Total :</b>		<b>83.2 (A)</b>

Mahasiswa dinyatakan "**LULUS**" dengan masa perbaikan selama "dua" bulan.

Ketua

  
Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I  
 NIP.197707252002121001

Bandar Lampung, 21 April 2020

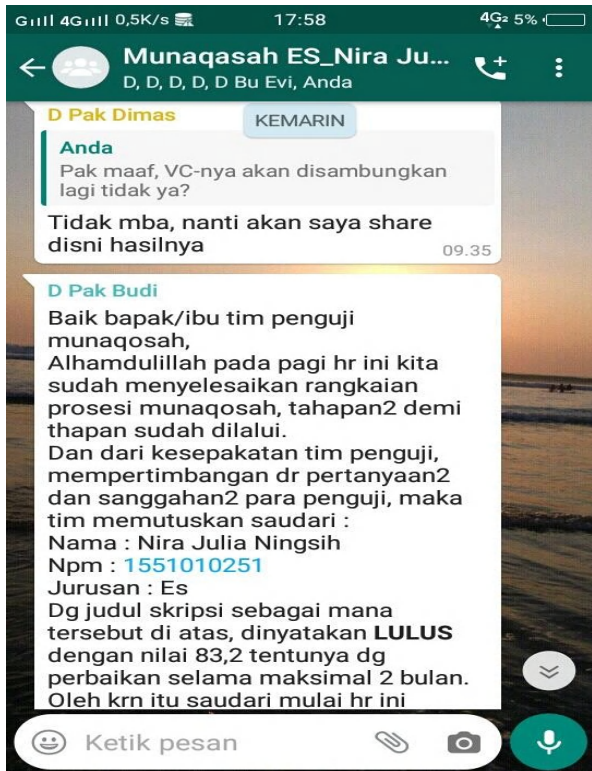
Sekretaris

Dimas Pratomo, S.E.I., M.E  
 NIP. 199305282018011003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289*





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH MAHASISWA SEMESTER  
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengetahui tingkat kelayakan dan pemahaman mahasiswa terhadap karya ilmiah yang akan menjadi syarat kelulusan pada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas menguji ujian Munaqasah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI No.22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 635.a tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 21 April 2020

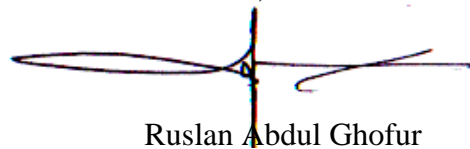
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH PRODI EKONOMI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran sebagai ketua sidang, penguji I, penguji II dan sekretaris pada ujian munaqasah skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya, ketentuan pelaksanaan ujian seminar munaqasah mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 21 April 2020

DEKAN;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ruslan Abdul Ghofur', is written over a vertical red line. The signature is stylized with long horizontal strokes extending to the left and right.

Ruslan Abdul Ghofur

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung



# **SURAT TUGAS**

Nomor : /In.04/DE/PP.00.9/ /2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung menugaskan kepada Yth:

NO	NAMA /NIP	TUGAS
1	Budimansyah, S. Th. I., M.Kom.I	Ketua Sidang
2	Dimas Pratomo, S.E.I., M.S.I	Skretaris
3	Hanif, S.E., M.M.	Penguji I
4	Evi Ekawati S.E.M.Si	Penguji II

dalam Munaqasah Skripsi Mahasiswa :

1. Nama : Nira Julia Ningsih
2. NPM/Jurusan : 1551010251/ Ekonomi Syariah

pada :

1. Hari/Tanggal : Selasa/ 21 April 2020
2. Jam : 08.00 WIB
3. Tempat : Aplikasi Virtual (Daring)

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 21 April 2020  
Dekan,

**Ruslan Abdul Ghofur**